

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era revolusi industri 4.0, teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dimana pada era ini konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi. Bahkan, sebagian besar masyarakat sudah mempergunakan informasi teknologi dalam kesehariannya.

Dalam menerima suatu layanan yang berbasis teknologi informasi, kita bisa mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman informasi tersebut berdasarkan perilaku dari penggunaannya. Di dalam sistem informasi keperilakuan penggunaannya dapat dikaji dan diukur dengan menggunakan beberapa teori.

Menurut Wilkinson (2000) dalam Sayekti dan Putarta (2016) model evaluasi yang sering digunakan untuk mengukur penerimaan sistem informasi adalah: *End User Computing Satisfaction*, *Task Technology Fit*, *Human-Organization-Technology (HOT)* dan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Dari sekian model yang dapat digunakan, *Technology Acceptance Model* merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku pengguna terhadap sistem informasi selain itu, TAM merupakan model pendekatan yang paling banyak digunakan oleh peneliti dalam mengukur kesuksesan penerapan suatu sistem informasi berdasarkan keinginan si penggunaannya (Sayekti dan Putarta, 2016).

Teori TAM yang dikemukakan oleh Davis (1989) dalam Sayekti dan Putarta (2016) dikatakan perancangan teori ini dilakukan untuk memprediksi penerimaan teknologi informasi yang akan digunakan oleh pengguna. Penggunaan teori ini, dapat memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi

diterimanya suatu teknologi oleh pengguna. Konsep TAM memiliki dua konstruk utama diantaranya adalah *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* (Davis, 1989) dalam (Sulina, dkk, 2017).

Dalam organisasi sektor publik TAM ini banyak digunakan untuk menguji penerimaan terhadap sesuatu yang baru yang berhubungan dengan teknologi. Seperti yang dilakukan oleh Hanifa (2017), yang melakukan penelitian terhadap penerimaan layanan *internet banking* pada BRI Syariah cabang Surakarta. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemudahan penggunaan layanan *internet banking* akan memberikan manfaat dari segi waktu dan tenaga pasalnya, para nasabah tidak membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengantri ataupun pergi ke bank hanya sekedar untuk melakukan transaksi, mereka bebas bertransaksi walaupun tidak harus datang ke bank.

Selain pada layanan *internet banking*, model TAM juga digunakan untuk menganalisis dampak penerimaan sistem keuangan desa. Penelitian ini dilakukan oleh (Sulina dkk, 2017) yang menyebutkan bahwa Siskeudes memberikan peran penting bagi kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh pegawai desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Salisa dkk, 2019) menyebutkan bahwa faktor yang ada dalam konstruk TAM telah mampu mempengaruhi penerimaan penggunaan Siskeudes di Pemerintah desa Kabupaten Kudus dengan baik, walaupun masih ada satu faktor yaitu faktor kemudahan yang tidak memiliki pengaruh terhadap sikap penggunaan aplikasi Siskeudes.

Dari beberapa studi empiris yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa teori dari TAM dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerimaan

pengguna atas penggunaan teknologi. Aplikasi Siskeudes ini merupakan sebuah aplikasi untuk mengelola tata keuangan di kalangan pemerintah desa.

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara. Sebagai level pemerintahan terendah, desa memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Secara yuridis dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri pasal 11 ayat 2 juga dijelaskan bahwa desa juga mendapatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lainnya dimana perincian masing masing sumber pendapatan tertuang langsung pada Permendagri tersebut.

Banyaknya pendapatan yang diperoleh suatu pemerintah desa tak lain untuk memajukan pembangunan di desanya. Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dalam segi keuangannya. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) Pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari

pemerintah desa agar menjadi lebih baik serta program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Presiden Terpilih Joko Widodo menyiapkan anggaran sebesar Rp.400 triliun untuk program Dana Desa. Dana itu akan digelontorkan untuk menjalankan program desa selama lima tahun ke depan. Anggaran ini meningkat apabila dibandingkan pada Pemerintahan Kabinet Kerja tahun 2014-2019 yang hanya berkisar Rp.257 triliun (Kompas.Com pada tanggal 29 Pebruari 2019 dengan judul berita Total Dana Desa 2019-2024 400 Triliun).

Namun, besarnya alokasi tersebut memunculkan kekhawatiran tersendiri akan efektivitas dan transparansi penggunaannya. Berbagai pihak menilai bahwa sampai saat ini pelaksanaan UU Desa terkesan mendesak untuk dilaksanakan, sehingga ketika diimplementasikan masih banyak dihadapkan dengan perubahan struktur pemerintahan desa yang belum tertata dengan baik. Hal yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak adalah terjadinya korupsi tingkat bawah. Kekhawatiran ini juga pernah dibuktikan dengan ditemukannya kasus penyimpangan desa di beberapa daerah.

Salah satunya adalah penyimpangan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Sampang tepatnya di Kecamatan Kedungdung pada tahun 2016. Dalam Media Madura yang terbit pada tanggal 11 Maret 2019 diberitakan bahwa Polda Jatim melakukan OTT yang menyeret dua nama pejabat PNS di lingkungan Pemkab Sampang, yaitu Camat dan Kasi PMD Kedungdung dalam hal ini Ahmad Junaidi dan H. Kun Hidayat. Kondisi ini disinyalir karena rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa beserta aparaturnya .

Salah satu komponen kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang masih rendah, sehingga

menyebabkan rendahnya kemampuan dalam perencanaan tingkat desa yang berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. Dengan kata lain lemahnya dukungan sumber daya manusia di desa akan menyebabkan terjadinya kesalahan administratif maupun substantif dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Demi membantu penataan pengelolaan desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka dibutuhkan suatu alat kontrol. Alat kontrol tersebut berupa pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar program Dana Desa benar-benar mampu mengakomodasikan kebutuhan desa tersebut. Perwujudan tersebut dapat diusahakan salah satunya melalui pengembangan Aplikasi tata kelola keuangan Desa yang disebut Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini merupakan aplikasi komputer yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaannya seperti korupsi dan lain lain karena dijalankan dengan menggunakan mesin dan tidak lagi manual. Menurut Abdullah dan Samad (2019: 15) Tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang.

Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis

V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes V1.0.R1.06. perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut.

Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis *Versi 2.0*. Dalam situs resmi BPKP yang ditulis pada tanggal 21 Nopember 2018 diberitakan percepatan penyesuaian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes *versi 2.0*) dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 Tahun 2018 pada tanggal 29 Oktober 2018 dan di *launching* pada tanggal 21 Nopember 2018. Prosedur penggunaan Aplikasi ini dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Pelaksanaan bimtek penggunaan aplikasi Siskeudes *versi 2.0* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri dilaksanakan di Hotel Wisata Camplong selama 7 hari yang terbagi ke dalam 3 angkatan yakni angkatan 1 tanggal 1-3 Mei 2019, angkatan 2 tanggal 3-5 Mei 2019 dan angkatan 3 tanggal 5-7 Mei 2019. Hal ini saya kutip pada laman <http://regamedianews.com> pada tanggal 7 Mei 2019 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, H. Malik Amrullah :

“Sasaran bimtek Siskeudes *versi 2.0* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah meningkatkan dan memantapkan pengetahuan dan pemahaman TA/PA, PD, PLD, Operator Siskeudes Kabupaten, Operator Siskeudes Kecamatan dan Staf Urusan Keuangan/Operator Desa dalam melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel pada tahap perencanaan, penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa

berbasis Siskeudes versi 2.0”, tutur Malik Amrullah.
(<http://regamedianews>)

Menurut PUTATGEDE.DESA.ID (2018) Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi Siskeudes versi 2.0 dibandingkan Siskeudes versi sebelumnya adalah : tidak memerlukan teknisi khusus dalam menginstal aplikasinya, aplikasi ini memudahkan tata kelola Keuangan Desa dan Dana Desa, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi, dilengkapi dengan Sistem Pengendalian *Intern (Built-in Internal Control)*, karena dibangun dan dikembangkan oleh seluruh pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, mudah digunakan (*User Friendly*) sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level Pemerintah Desa, *Maintenance* secara kontinyu karena merupakan aplikasi resmi Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa, dapat berintegrasi dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi ‘OM-SPAN’ milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ‘SIPEDA’ milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) serta lebih lengkap karena terinput mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran yang diimplementasikan di RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Sejak diterapkannya aplikasi Siskeudes versi 2.0 pada awal anggaran tahun 2019, sistem informasi ini ternyata masih banyak mengalami kekurangan, seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafiih ketua operator Kecamatan Sampang :

“Aplikasi Siskeudes *versi 2.0* masih belum terkoneksi pada sistem OM-SPAN milik kementerian keuangan seperti yang disosialisasikan pada saat awal bimtek. Padahal di awal *launching* sistem informasi ini digadang-gadang mengalami perbaikan dari versi 1.0, namun kenyataannya hingga detik ini belum terkoneksi langsung, bahkan ditegaskan dan disampaikan bahwa koneksi akan terlaksana pada tahun 2020 pada Siskeudes terbaru nantinya yaitu Siskeudes 2.2.

Terdapatnya perbedaan antara keunggulan Siskeudes *versi 2.0* secara teori dan praktek di lapangan menjadikan penelitian ini sangat menarik untuk dikaji. Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Isnaini, dkk (2019). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada teknik analisis data, versi aplikasi Siskeudes dan objek penelitian yang digunakan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *SmartPLS*. Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009) Keunggulan teknik analisis PLS adalah: mampu memodelkan banyak variabel dependen dan independen (model kompleks), mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen, hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal, menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis *cross-product* yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi, dapat digunakan pada sampel kecil (di bawah 100) dan tidak mensyaratkan data terdistribusi normal.

Penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan versi terbaru yaitu menggunakan Siskeudes *versi 2.0*. Sementara objek penelitian dilakukan pada desa di Pemerintahan Kabupaten Sampang. Dasar pemilihan objek ini karena di Kabupaten ini pernah terjadi OTT penyimpangan dana desa yang melibatkan dua oknum pejabat PNS pada tahun 2016 oleh Polda Jatim. (Media Madura, terbit tanggal 11 Maret 2019). Selain itu, aplikasi ini merupakan aplikasi yang

baru rilis dan baru diterapkan di awal tahun 2019. Hal ini didukung dengan adanya BIMTEK penggunaan aplikasi Siskeudes *versi 2.0* yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang pada tanggal 6 Mei 2019 (Regamedianews.com, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Technology Acceptance Model* Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Aplikasi Siskeudes *versi 2.0* di Kabupaten Sampang)”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) pada aplikasi Siskeudes *versi 2.0* untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?
2. Apakah persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*) pada aplikasi Siskeudes *versi 2.0* untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?
3. Apakah persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) berpengaruh positif terhadap sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*) pada Siskeudes *versi 2.0* untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?

4. Apakah persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap minat perilaku dalam menggunakan teknologi (*Behavioral Intention to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?
5. Apakah persepsi sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*) berpengaruh positif terhadap Minat Perilaku pengguna (*Behavioral Intention to Use*) teknologi Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?
6. Apakah persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*Actual Technology to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?
7. Apakah minat perilaku menggunakan teknologi (*Behavioral Intention to Use*) berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*Actual Technology to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) terhadap persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using*

Technology) pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) terhadap sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap minat perilaku dalam menggunakan teknologi (*Behavioral Intention to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi sikap dalam menggunakan teknologi (*Attitude Towards Using Technology*) terhadap Minat Perilaku pengguna (*Behavioral Intention to Use*) teknologi Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang
6. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*Actual Technology to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang
7. Untuk mengetahui pengaruh minat perilaku menggunakan teknologi (*Behavioral Intention to Use*) terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*Actual Technology to Use*) pada Siskeudes versi 2.0 untuk pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sampang

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan guna mencapai dan memperbaiki persepsi aparatur desa terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan dalam menggunakan aplikasi Siskeudes *versi 2.0* ditengah persaingan yang semakin ketat
2. Bagi para perangkat desa atau operator desa berguna untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menerima aplikasi Siskeudes *versi 2.0* dan menggunakannya dengan baik serta dapat menambah pengetahuan mengenai model penerimaan teknologi.
3. Bagi dunia akademis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan wawasan dalam mengelola keuangan desa menggunakan suatu aplikasi Siskeudes *versi 2.0* dengan pendekatan TAM (*Technology Acceptance Model*).
4. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes *versi 2.0*.